**ANALISIS TERHADAP MEKANISME PASAR SYARIAH
(PEMBAGIAN KEPEMILIKAN)**

**ARTIKEL INI DIBUAT UNTUK MEMENUHI TUGAS
AKHIR PADA MATA KULIAH EKONOMI SYARIAH**

MUH.RAFLI

90500120053

PROGRAM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TAHUN 2021

Abstrak

Kekayaan merupakan suatu hal yang sangat diinginkan manusia dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, bukan untuk dijadikan tujuan hidup. Pembagian kepemilikan terbagi menjadi 3 yaitu kepemilikan individu, umum, dan negara. Hal ini dilakukan agar kesejahteraan baik individu, umum, maupun negara bisa terjaga keseimbangannya.

Kata kunci: Ekonomi, Pendidikan, Sumber dana

Latar Belakang

Manusia menurut pandangan Islam memiliki fitrah atas kecenderungan terhadap dorongan dan insting sosial untuk menyukai harta benda, menguasai dan mempertahankannya, dalam beberapa ayat al Qur'an telah mengisyaratkan tentang hal itu. Dalam usaha memenuhi keinginan tersebut seseorang berusaha dengan berbagai aktivitas ekonomi, karena sifat kecenderungan ingin memiliki harta sehingga manusia mau bekerja keras. Allah telah menjadikan harta sesuatu yang indah dalam pandangan manusia, manusia diberi tabiat alamiah mempunyai kecintaan terhadap harta.

Kecintaan manusia terhadap harta ini harus mendapatkan bimbingan wahyu yang mengarahkan bahwa harta bukan tujuan hidup, akan tetapi hanya sebagai sarana yang harus dipertanggung jawabkan kepada Allah. Harta dalam Islam dianggap sebagai bagian dari aktivitas dalam kehidupan yang dijadikan oleh Allah untuk membantu proses tukar-menukar (jual beli), dan juga digunakan sebagai ukuran terhadap nilai. Syariat Islam dengan kaidah dan konsepnya akan mengontrol

cara untuk mendapatkan harta, menyalurkan, proses pertukaran dengan barang lain serta pengaturan hak-hak orang dalam harta itu.

Di sisi lain bahwa semua harta atau kekayaan yang ada di bumi ini pada hakikatnya adalah milik Allah SWT secara mutlak dan tunduk kepada aturan yang telah digariskanNya. Oleh karena itu manusia berkewajiban merasa terikat dengan perintah dan ajaran Allah tentang harta, hak milik manusia bersifat tidak mutlak dalam hal kepemilikan harta. Manusia pada hakikatnya hanya mempunyai hak untuk menggunakan dan mengatur harta itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan, sehingga memberikan kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Dan semua yang ada di langit dan di bumi ini sebenarnya diperuntukkan bagi manusia

Secara logika dapat dipastikan segala yang diciptakan Allah SWT bagi manusia pasti mencukupi untuk seluruh umat manusia. Persoalan kepemilikan timbul ketika manusia berkumpul dan berinteraksi membentuk suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka kelangsungan hidupnya. Dalam realitas kehidupan dijumpai ada sekelompok manusia yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan sampai berlebih, di sisi yang lain tidak sedikit kelompok manusia lain yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari sini kemudian pembahasan konsep kepemilikan harta menjadi sangat penting dilakukan secara mendalam, untuk dapat memperoleh jawaban bagaimana seharusnya pengaturan kepemilikan terhadap harta yang sudah dianugerahkan oleh Allah SWT dapat memenuhi kebutuhan hidup seluruh manusia secara adil. Dalam makalah ini akan diuraikan pokok bahasan konsep kepemilikan, yang berisi; aspek historis kepemilikan, pembagian kepemilikan dalam Islam, kemudian untuk

pemanfaatan dan pengembangan kepemilikan berisi antara lain : pemanfaatan kepemilikan dan pengembangan kepemilikan.

Konsep Kepemilikan

Hubungan hak milik menentukan garis besar sebuah sistem ekonomi. dua sistem ekonomi yaitu kapitalis dan sosialis berbeda antara yang satu dengan yang lain, karena cakupan kebebasan individual untuk memiliki hak milik pribadi. Islam menawarkan pandangan ketiga: bahwa segala sesuatu yang ada di dunia adalah milik Allah semata . Ia adalah pemilik sesungguhnya yang berhak untuk menentukan penggunaan, bentuk hak milik. Manusia memperoleh sejumlah tanggung jawab, untuk melaksanakan tanggung ini, manusia telah dianugerahi fasilitas yang diperlukan, , manusia harus berusaha untuk mengolah dan untuk apa hasil olahannya. tujuan ini telah diterangkan secara panjang lebar dalam syariat Islam.

Konsep dasar pengaturan harta dan pembangunan system ekonomi sebenarnya menyangkut tiga hal yaitu, konsep kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan dan distribusi kepemilikan⁴. Dalam makalah ini hanya akan membatasi pada pokok bahasan yaitu pada aspek historis kepemilikan

Aspek historis kepemilikan

Sejarah perkembangan system ekonomi dunia mencatat ada tiga system ekonomi yang memberikan pengaruh cukup besar dalam kehidupan manusia, yaitu Kapitalis, Sosialis dan Islam. System ekonomi Kapitalis dan Sosialis telah terbukti gagal menghantarkan manusia mendapatkan kesejahteraan hidup dan justru memberikan begitu banyak persoalan-persoalan yang cukup pelik.

Pada dasarnya masalah eksistensi suatu system ekonomi dimulai dari filsafat ekonomi, nilai dasar system dan nilai instrumental dari suatu system. Filsafat ekonomi merupakan asas dari suatu system ekonomi yang dibangun berdasarkan pandangan suatu kehidupan, yaitu hubungan antara manusia, alam dan Tuhan. Dari filsafat ekonomi ini dibentuk nilai-nilai dasar system yang akan membentuk kerangka social, legal dan perilaku dari system tersebut. Hal ini kemudian akan diturunkan dalam nilai instrumental sebagai aturan main yang akan mendorong system tersebut berjalan.

Sistem ekonomi kapitalis dibentuk dari filsafat laissez faire. Kapitalis mengakui Tuhan namun menolak adanya campur tangan Tuhan dalam kehidupan (dalam hal ini masalah ekonomi). Sehingga kapitalis meletakkan nilai dasar kebebasan, individual, hak kepemilikan adalah absolute⁶. Dan pada ujungnya system ekonomi ini membuat manusia menjadi serakah dan terjadi kompetisi yang tidak sehat yang dikenal dengan free fight liberalism. System kapitalisme ini selanjutnya menjadikan kepemilikan terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu dan melahirkan proses dehumanisasi.

Sistem ekonomi sosialis menolak campur tangan Tuhan sedari awal dan membawa manusia kepada materialisme.

Sosialis lahir dari filsafat konflik, yaitu pertentangan antar kelas. Sosialis mengorbankan kebebasan dan hak milik pribadi sehingga semua kegiatan diambil alih negara untuk kepentingan masyarakat. Semua adalah milik Negara, individu diberi hak sebatas yang diperlukan dan dia bekerja sebatas yang dia bisa. Sosialisme mematikan kreatifitas manusia, karena kepemilikan individu tidak diakui, dorongan pencapaian pribadi ,menjadi tidak ada. Pada gilirannya terjadilah penurunan secara

drastis produktifitas masyarakat karena mereka telah kehilangan hasrat untuk memperoleh keuntungan (*profit motives*), sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi.

Dengan kegagalan kedua system ekonomi tersebut, munculah keinginan untuk melihat kembali system ekonomi islam yang sepanjang sejarahnya tidak pernah menimbulkan masalah. System ekonomi yang dibangun atas filsafat religious.

Pandangan Islam tentang kepemilikan berbeda dengan Kapitalisme yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada kuantitas (jumlah) dan kualitas (cara) perolehan harta serta pemanfaatannya. Berbeda pula dengan sosialisme yang mengawasi ketat baik kuantitas dan kualitas harta. Konsep ekonomi Islam memberikan proporsi yang terbaik atas konsep pemilikan. Dalam Islam mengakui kepemilikan individu namun tidak dalam kebebasan dan pembatasan secara absolute.

Islam secara tepat mengatur cara bukan jumlah pemilikan, serta mengatur cara pemanfaatan pemilikan.

Dalam sistem ekonomi terdapat beberapa unsur yang ada harus dipenuhi untuk menjalankan kegiatan tersebut salah satunya yaitu inti atau bisa disebut jantungnya. Banyak negara di dunia ini menggunakan sistem ekonomi yang berjalan di sistem kapitalisme. Jadi, islam memberikan sebuah solusi untuk melawan sistem ekonomi tersebut dengan cara membuat sistem ekonominya sendiri yaitu mekanisme pasar syariah.

Sistem mekanisme pasar syariah ini merupakan sistem ekonomi yang jenis kegiatan-kegiatan perekonomian yang dijalankan itu menerapkan prinsip syariat islam sebagai dasar hukum cara kerjanya. Dalam mekanisme pasar syariah ini, terdapat beberapa landasan atau hukum yang ada yaitu

1. Pembagian kepemilikan

2. Mengganti jantung ekonomi
3. Hukum perseroan
4. Hukum industri
5. Hukum lahan
6. Hukum ketenagakerjaan
7. Hukum permodalan
8. Hukum perdagangan

Hari ini saya akan membahas tentang mekanisme pasar syariah lapis yang pertama yaitu pembagian kepemilikan. dalam islam segala barang maupun hak di dunia merupakan milik Allah SWT. Seseorang memperoleh segala suatu tanggung jawab yang harus dijalankan karena dia sudah diberikan sebuah kenikmatan oleh Allah SWT.

Dalam pembagian kepemilikan dalam islam, kepemilikan terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Kepemilikan individu

Kepemilikan individu adalah konsep yang di akui oleh islam yang dimana seseorang memiliki hak untuk memperoleh kekayaan yang dapat bergerak maupun tidak. Tetapi hak ini dibatasidan dikontrol langsung oleh hukum syariah. Adapun cara untuk memperoleh hak ini yaitu dengan cara bekerja, diwariskan, harta yang dibagikan oleh pemerintah, dll. Kita juga dianjurkan untuk memanfaatkan harta ini igunakan bagi perkara yang wajib dilakukan seperti membayar zakat dan naik haji. Kita juga bisa mengembangkan harta dengan jual beli, kerja sama yang diberbagai bidang seperti pertanian maupun perdagangan barang dan jasa sesuai hukum islam.

Tapi kita juga dilarang mengembangkan harta dengan cara yang salah seperti judi, riba, investasi yang haram dilakukan, dll.

2. Kepemilikan umum

Kepemilikan umum adalah kekayaan yang dimana Allah sudah menetapkan atau mengatur bahwa seluruh kekayaan bagi umat islam merupakan milik bersama. Pengelolaan kepemilikan umum ini harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus mengelola kekayaan ini secara adil yang harus diberikan kepada masyarakatnya.

Pemanfaatan kepemilikan publik atau umum ini dilakukan dengan cara pemerintah harus memproduksi sebuah barang yang kemudian hasilnya ini diberikan secara gratis kepada seluruh rakyatnya.

3. Kepemilikan suatu negara

Yaitu kekayaan yang sudah ditetapkan oleh Allah yang menjadi hak seluruh umat muslim di dunia. Pengelolan ini di serahkan kepada khalifah. Kekayaan milik negara ini contohnya seperti jizyah, harta-harta orang yang sudah murtad, dll. Khalifah maupun pemerintah harus mengelola kekayaan ini semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kaum muslim, sehingga usaha yang dilakukan itu tidak berjalan dengan sia-sia.

Walaupun harta milik publik dan harta milik negara ini pengelolaannya sama-sama dilakukan oleh negara, nyatanya keduanya berbeda. Harta milik publik ini tidak boleh diberikan kepada suatu individu sedangkan milik negara, pengelola bisa

memberikan harta kekayaan itu terhadap suatu individu tetapi harus memenuhi syarat sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan.

Pemanfaatan dan Pengembangan Kepemilikan

Untuk memanfaatkan harta, Islam mengajarkan agar memanfaatkan hartanya mula-mula untuk mencukupkan kebutuhan dirinya sendiri, lalu untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya, baru memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, Islam mengharamkan bermegah-megah dan berlebih-lebihan (Israf dan mubazir). Karena sifat ini cenderung kepada penumpukan harta yang membekukan fungsi ekonomis dari harta tersebut. Untuk itulah pada satu takaran tertentu harta dikenai wajib zakat. Zakat merupakan implementasi pemenuhan hak masyarakat dan upaya memberdayakan harta pada fungsi ekonomisnya.

1. Pemanfaatan Kepemilikan

Harta yang dimiliki oleh seseorang tentu dimaksudkan untuk memanfaatkan harta tersebut dan larangan memiliki harta tanpa dimaksudkan untuk memanfaatkan harta itu. Harta yang dibiarkan tanpa dimanfaatkan akan menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan produktifitas perekonomian. Bentuk-bentuk pengaturan mengenai pengelolaan harta mencakup tatacara pembelanjaan dan tatacara pengembangannya. Islam menghendaki agar siapapun ketika mengelola harta melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Prioritas utama yang dilakukan terkait dengan pengelolaan harta adalah mengkonsumsi habis, khususnya menyangkut barang yang habis pakai seperti makanan dan minuman. Atau mengkonsumsi dalam arti sekedar mengambil manfaat dari harta seperti pakaian, rumah, mobil dan sebagainya. Seorang muslim harus

tunduk mengikuti hukum syariah yang terkait harta yang dimiliki. Mengingat dalam Islam setiap semua bentuk pemanfaatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak. Terkait dengan harta, pertanggungjawaban yang diberikan meliputi dua perkara; tidak hanya untuk apa harta itu digunakan dan dari mana harta didapat.

Rambu-rambu pemanfaatan harta dalam Islam dasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip Sirkulasi dan perputaran, artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi.sarana yang diterapkan oleh syari'at untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi, menipu.
- b. Prinsip jauhi konflik. Artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, al-isyahad/saksi, jaminan (rahn/gadai).
- c. Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta yaitu perintah untuk zakat infak shadaqah, dan larangan terhadap penghamburan (Israf/mubazir).

Kesimpulan

Dalam islam, kita tidak hanya diatur bahwa harta itu halal, bagaimana cara mengembangkan harta tersebut, tetapi kita juga diajarkan bahwa harta yang dimiliki itu dapat membuat mensejahterahkan orang lain, yaitu dengan menggunakan harta tersebut bagi orang lain sesuai dengan ketentuan Allah maupun utusannya.

Kepemilikan harta dalam islam dimana Allah merupakan pemilik mutlak harta tersebut, yang dimana kekayaan yang dimiliki oleh setiap manusia itu merupakan hanyalah sebuah titipan dan amanat yang harus dijalankan sesuai keinginan orang tersebut.

Daftar Pustaka

Al-Misri, Rafiq Yunus. *Usul al-Iqtishad al-Islami*. Beirut: Dar al-Qalami, 1999.

An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.

An Nabhani, Taqiyuddin, , *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*”
terj. M.Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

Antonio, Muhammad Syafi’i , *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema
Insani, 2011

Chapra , Umer, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, terj.Ikhwan Abidin Basri Jakarta :
Tazkia, 2005

Inayah , Ghazi, *Ushul al Maliyah al Amah al Islamiyah*, Beirut : Daar ibn Hazm, 1993), 15.

Mayer, Ann Elizabeth. *Property, Social Structure and Law in The Modern Middle East*. New York: State University of New York Press, 1985.

Nawawi , Ismail, *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum*, (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009),

Siddiqi, M. Nejatullah. *Role of The State in The Economy*. United Kingdom: The Islamic Foundation, 1996.

Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syari'ah Bukan OPSI Tetapi SOLUSI*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009

Yunus, M.Ismail dan Yusanto, M Ismail. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Press, 2009.